



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kajian Pustaka	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian	10
F. Definisi Operasional	11
G. Metode Penelitian	13
1. Lokasi Penelitian	13
2. Data yang dikumpulkan.....	13
3. Sumber Data yang Dihimpun.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data	16
H. Sistematika Pembahasan	17



BAB II PERAN <i>WILĀYAH AL-HISBAH</i> DALAM HUKUM ISLAM	19
A. Pengertian <i>Wilayah Al-Hisbah</i>	29
B. Syarat-Syarat <i>Al-Muhtasib</i>	22
C. Tugas Wilayah <i>Al-Hisbah</i>	25
D. Wewenang <i>Wilayah Al-Hisbah</i>	27
BAB III PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN SUMENEP 2009	
A. Profil Panwaslu Kabupaten Sumenep	29
1. Struktur Panwaslu Kabupaten Sumenep	30
2. Tugas Dan Wewenang Panwaslu Kabupaten Sumenep	33
3. Kewajiban Panwaslu Kecamatan Sumenep.....	37
4. Ruang Lingkup Pengawasan Panwaslu Kabupaten Sumenep	41
5. Mekanisme Pengawasan dan Rekomendasi.....	43
6. Ketentuan Penanganan Temuan Pengawas Pemilu	44
B. Pelaksanaan Pemilu Legislatif Kabupaten Sumenep 2009	46
1. Sekilas Gambaran Pemilu Legislatif Kabupaten Sumenep	46
2. Indikasi Pelanggaran Dalam Pemilu Legislatif 2009 di Desa Talang Kecamatan Saronggi	47
C. Berita Acara Panwaslu Kabupaten Sumenep Terkait Pelanggaran UU. No. 10 Tahun 2008 Pasal 220	48
D. Tata Cara Pelaporan Panwaslu Kabupaten Sumenep Mengenai Pelanggaran Pemilu Legislatif 2009.....	59
E. Temuan Pelanggaran Dan Penyelesaian Panwaslu Kabupaten Sumenep Dalam Pelanggaran Pemilu Lgislatif 2009	



	Berdasarkan UU. 10 Tahun 2008 Pasal 220	60
Bab IV	ANALISIS <i>FIQH SIYĀSAH</i> DALAM KINERJA PENGAWASAN PANWASLU KABUPATEN SUMENEP MENURUT UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2008 PASAI 220 TERHADAP PELANGGARAN PEMILU LEGISLATIF 2009	64
	A. <i>Analisis Fiqh Siyāsh</i> Terhadap Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten Sumenep Terhadap Pelanggaran Pemilu Legislatif 2009 Menurut UU. No 10 Tahun 2008 Pasal 220	64
	B. <i>Analisis Fiqh Siyāsh</i> Terhadap Penentuan Kriteria Pelanggaran Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Berita Acara Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sumenep Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Pasal 220	68
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP	